

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang demokratis. Cerminan dari pemerintah yang demokratis adalah dengan adanya transparansi dalam menyajikan informasi mengenai anggaran dan keuangan kepada publik. Perwujudan nilai akuntansi yang transparan nantinya akan memudahkan dilaksanakan pengawasan, mencegah tingkat korupsi dan penyalagunaan sumber daya sektor publik yang akan berakibat pada pemborosan.

Di Indonesia, permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dijalkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001. Salah satu tujuan utama menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk mewujudkan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik, partisipasi, efisien, efektivitas, serta penegakan hukum. Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum, sosial, ekonomi, maupun manajemen akuntansi dan manajemen keuangan daerah.

Reformasi pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan terperinci, sehingga pemerintah dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat dan pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggung jawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab. Akuntabilitas dan transparansi salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Pertiwi, 2015: 2).

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu; ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

(Kurniawan, 2003: 2) mengemukakan bahwa, transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat khusus masyarakat sumba barat sebagaimana dana publik digunakan atau dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah. Tuntutan akuntabilitas publik (*public accountability*) pada era reformasi membawa dampak terhadap proses pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Transparansi dan akuntabilitas publik ini menjadi kajian yang marak, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis. Isu seputar transparansi dan akuntabilitas tidak terlepas dari maraknya penyalagunaan wewenang dan penyelewengan dana oleh oknum pegawai maupun pejabat pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangannya dengan prinsip pengukuran kinerja (Nugrahani, 2007).

*Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara (Mardiasmo, 2002: 4).

Anggaran dengan konsep *Value for Money* merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil (*output*) yang didasarkan pada

tiga elemen yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Dalam pembuatan anggaran harus memperhatikan tiga aspek yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Penganggaran juga memerlukan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pelaporan. Proses akan lebih efektif jika terdapat lembaga pengawas khusus yang bertugas penganggaran. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20).

Perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti, pemerintah pusat, daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya (Rosjidi, 2001:34) Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabiitas, Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Pemerintah Kabupaten Malang. Dan

hasil penelitian menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi dari entitas legal multi. Akuntansi sektor terdiri dari (1). Lembaga – lembaga Negara, Aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh satuan kerjanya, (2). Aparatur Perekonomian Negara dan Daerah dengan semua unit Organisasinya berdasarkan pada hukum publik, kecuali persero dan perseroda yang didasarkan pada hukum dagang bagian dari hukum privat.

(Halim dan Kusufi, 2013:3). Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Masalah yang dihadapi dalam perwujudan nilai transparansi, akuntabilitas, dan konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada BAPPEDA Kabupaten Sumba Barat terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan agar dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dapat optimal, karena pengukuran kinerja pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik, sehingga organisasi publik berkaitan erat dengan produktifitas, kualitas, layanan, responsivitas, tanggungjawab, akuntabilitas, serta bersama pelayanan.

Alasan memilih judul yaitu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengukuran kinerja keuangan berdasarkan metode *value for money* pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Tujuan menjawab persoalan untuk menganalisis perwujudan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada BAPPEDA Kabupaten Sumba Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin tertarik untuk melakukan penelitian mengenai nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan konsep *value for money* yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti memberi judul penelitian ini **“Perwujudan Nilai – Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Nilai – Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat ”

### **1.3 Persoalan Penelitian**

Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat?
3. Bagaimana penerapan konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat.
3. Untuk mengetahui penerapan konsep *Value For Money* dalam penerapan pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademik**

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasana keilmuan akuntansi sektor publik, serta penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

### **2. Manfaat Praktis**

#### 1) Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yaitu untuk menamba wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami tentang Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Bappeda Kabupaten Sumba Barat.

#### 2) Bagi instansi

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan masukan dan dapat mengetahui bahwa pentingnya tentang Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Bappeda Kabupaten Sumba Barat.

#### 3) Bagi pembaca

Dengan penelitan ini ,berharap dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Bappeda Kabupaten Sumba Barat